

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum tercapainya kesetaraan gender dalam struktur pemerintahan *Gampong* Deng, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara. Seluruh aparatur pemerintahan *Gampong* diisi oleh laki-laki, meskipun terdapat perempuan yang memiliki tingkat pendidikan tinggi. Hal ini mencerminkan masih kuatnya budaya patriarki serta minimnya ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab rendahnya keterlibatan perempuan dalam birokrasi pemerintahan *Gampong* dan bagaimana aspirasi mereka diakomodir dalam tata kelola desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara tematik dengan pendekatan induktif, kemudian Teknik analisis data dengan reduksi data, display data dan kesimpulan/verifikasi. Penelitian ini dianalisis menggunakan lima teori: Teori Alamiah, yang melihat perbedaan peran sebagai kodrat biologis; Teori Evolusi Fungsional, yang menganggap pembagian peran sebagai hasil adaptasi sosial; Teori Ekonomi, yang menyoroti potensi ekonomi perempuan yang belum dimanfaatkan dalam pemerintahan desa; Teori Enlightenment, yang menekankan pentingnya kesetaraan hak perempuan dalam ranah publik; serta Teori Pertentangan Kelamin, yang memandang ketimpangan gender sebagai hasil konstruksi sosial yang perlu dilawan secara sistemik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi perempuan disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: stereotip gender, beban ganda, dominasi budaya patriarki, kurangnya ruang partisipasi, serta belum optimalnya dukungan kebijakan dari pemerintah *Gampong*. Aspirasi perempuan belum sepenuhnya terakomodir dalam musyawarah dan kebijakan desa karena terbatasnya waktu, peran domestik yang dominan, serta minimnya pelibatan formal. Rekomendasi dari penelitian ini adalah pentingnya pelatihan kepemimpinan bagi perempuan, pembentukan forum aspirasi perempuan, penyusunan kebijakan afirmatif di tingkat desa, serta penguatan perspektif gender di dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pemerintahan *Gampong*. Dengan demikian, dapat tercipta pemerintahan desa yang lebih adil, inklusif, dan partisipatif.

Kata Kunci: Kesetaraan gender, partisipasi perempuan, birokrasi desa

ABSTRACT

This research is motivated by the lack of gender equality in the governmental structure of Gampong Deng, Tanah Luas Subdistrict, North Aceh Regency, where all village government positions are held by men, despite the presence of highly educated women. This indicates the persistence of patriarchal culture and limited opportunities for women to participate in decision-making at the village level. The aim of this study is to identify the factors contributing to the low involvement of women in the Gampong bureaucracy and to examine how their aspirations are accommodated in village governance. This research employs a descriptive qualitative method with a case study approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, and analyzed thematically using inductive reasoning with data reduction, data display, and conclusion drawing techniques. The analysis is supported by five theoretical frameworks: Natural Theory, Functional Evolution Theory, Economic Theory, Enlightenment Theory, and Gender Conflict Theory. The findings reveal that low female participation is influenced by gender stereotypes, double burdens, patriarchal dominance, lack of participatory space, and insufficient policy support. Women's voices are not fully represented in village forums due to time constraints, dominant domestic roles, and minimal formal involvement. This study recommends leadership training for women, the establishment of women's aspiration forums, the formulation of affirmative policies, and the integration of gender perspectives in village planning and decision-making, in order to create a more inclusive and participatory governance.

Keywords: *Gender equality, women's participation, village bureaucracy*